

# **GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)**

Yunita Prameswari<sup>1</sup>

Agustina Maya Saraswati<sup>2</sup>

Shinta Permata Sari<sup>3</sup>

*\*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta<sup>1</sup>*

*\*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta<sup>2</sup>*

*\*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta<sup>3</sup>*

*\*[yunitaprames@gmail.com](mailto:yunitaprames@gmail.com)<sup>1</sup>, [Shinta.Sari@ums.ac.id](mailto:Shinta.Sari@ums.ac.id)<sup>2</sup>*

**ABSTRACT:** *Islamic economics is increasingly become a popular issue. One of the topics of Islamic economics is Islamic Social Reporting (ISR). Islamic Social Reporting is a development of sharia-based Corporate Social Responsibility measurement. This study aims to analyze the effect of Good Corporate Governance that is proxied using the independent board of commissioners, audit committee, institutional ownership and managerial ownership on the Islamic Social Reporting (ISR). The study uses secondary data from the annual reports of companies listed in the Jakarta Islamic Index on 2017 and 2018. The samples of this study are 40 companies that are selected using purposive sampling methods. Data is analyzed using multiple linear regression. The results of the study showed that the independent board and managerial ownership have effect on ISR disclosure, meanwhile institutional ownership and audit committees have no effect on ISR disclosure.*

**Keywords:** *islamic social reporting, good corporate governance, jakarta islamic index*

## **1. PENDAHULUAN**

Setelah terjadinya revolusi industri perekonomian dunia semakin berkembang pesat. Indonesia saat ini telah memasuki revolusi industri 4.0 dimana persaingan bisnis antar perusahaan akan semakin ketat. Perusahaan harus menerapkan strategi yang tepat agar bisa bertahan dalam sengitnya persaingan bisnis. Saat ini perusahaan tidak hanya berfokus hanya untuk mencari *profit* semata melainkan juga harus mencari taktik bisnis lain, salah satunya yang populer adalah menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR). Isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* semakin menjadi sorotan penting dalam beberapa tahun terakhir karena Konsep CSR merupakan inti dari etika bisnis perusahaan (Novrizal dan Fitri, 2016). Perkembangan CSR di Indonesia telah mengalami peningkatan baik dalam segi kuantitas maupun kualitas

dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari semakin maraknya unit-unit bisnis yang melaporkan praktik CSR dalam laporan tahunan mereka (Fitria dan Hartanti, 2010).

Konsep CSR tidak hanya berkembang di ekonomi konvensional saja melainkan juga berkembang di ekonomi syariah. Sejauh ini indeks bagi pengukuran CSR masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (indeks GRI), tetapi hal ini dianggap kurang tepat untuk konsep ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan pada indeks GRI tidak terdapat nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya Haniffa (2002) memperkenalkan *Islamic Social Reporting Index* (indeks ISR) sebagai bentuk pengukuran baru CSR sesuai dengan prinsip syariah. Indeks ISR merupakan tolok ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan syariah yang berisi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam (Othman *et al.*, 2009). Indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan pijakan Islam (Fitria dan Hartanti, 2010).

Menurut Haniffa (2002) terdapat keterbatasan pada pelaporan sosial konvensional sehingga ia mengungkapkan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* sesuai ketentuan syariah yang tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga membantu pihak internal perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap Allah SWT dan masyarakat. ISR kemudian dikembangkan oleh Othman (2009) dengan menambahkan satu tema yaitu tata kelola perusahaan.

Tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG) berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini dikarenakan salah satu dari empat prinsip utama GCG yaitu *responsibility*. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sangat diperlukan untuk memenuhi kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perindustrian untuk berkembang dengan baik dan sehat yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *stakeholder value* (Murwaningsari, 2009). Timbulnya kesadaran untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik tidak terlepas dari tuntutan perekonomian di era modern saat ini. Semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis mau tidak mau mengharuskan setiap perusahaan dikelola dengan baik dan memenuhi tanggung jawab serta kewajibannya masing-masing. Aktivitas ekonomi yang dijalankan perusahaan diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat. Penerapan etika bisnis tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial suatu institusi bisnis.

Seiring berjalannya waktu semakin banyak pasar modal syariah yang bermunculan. Di Indonesia, salah satu instrumen pasar modal syariah adalah *Jakarta Islamic Index* (JII). JII merupakan salah satu indeks saham di Indonesia yang terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Perusahaan yang terdaftar di JII diharapkan dapat menyajikan suatu dimensi religi, termasuk dalam pengungkapan laporan tanggung jawab sosial perusahaannya. Hal tersebut bertujuan memberi manfaat bagi investor muslim maupun pihak lain yang terkait. Saham-saham syariah yang masuk dalam JII adalah saham-saham yang sudah lulus penyeleksian kriteria dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI (Hartini, 2018).

Berdasarkan latar belakang di atas menunjukkan bahwa diperlukannya pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan secara syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan masyarakat. Penelitian ini akan difokuskan pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2017 dan 2018. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR, salah satunya dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan variabel *good corporate governance*. Pengukuran GCG dalam penelitian ini menggunakan proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

Perusahaan yang terindeks JII menjadi tinjauan yang menarik dikarenakan penelitian tentang pengungkapan ISR lebih banyak dilakukan pada perusahaan keuangan seperti perbankan syariah, Konsep GCG dipilih karena pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sangat terkait dengan konsep tata kelola perusahaan. Jika dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, dewan komisaris dan komite audit mempunyai peran terhadap luasnya informasi yang akan disampaikan kepada publik. Jumlah anggota dewan komisaris yang semakin besar akan meningkatkan keefektifan dalam memonitoring aktivitas manajemen, memudahkan upaya pengendalian terhadap *Chief Executive Officer* (CEO), dan meningkatkan tekanan terhadap manajemen dalam memperluas informasi pengungkapan tanggung jawab sosial (Coller dan Gregory, 1999 dalam Hasanah *et al.*, 2017).

## **2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1. *Shariah Enterprise Theory***

*Shariah Enterprise Theory* dalam mengimplikasikan bahwa *stakeholder* tertinggi adalah Allah SWT. Allah menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta (Maulida *et al.*, 2014). Dalam *Syariah Enterprise Theory*, *stakeholder* ada tiga yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Allah SWT sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” akan tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah SWT sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi kontruksi akuntansi syariah. Intinya adalah bahwa dengan *sunnatullah* ini, akuntansi syariah hanya di bangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah SWT (Mais dan Lufian, 2018). ISR dalam hal ini merupakan amanah dan pemenuhan kewajiban sebagai makhluk Allah yang tidak terlepas dari tujuan Islam (Khasanah dan Yulianto, 2015). ISR merupakan sarana implementasi petanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat, alam dan Allah SWT sebagai pemegang *stakeholder* tertinggi.

### **2.2. Teori Legitimasi**

Legitimasi merupakan suatu hal yang penting untuk perusahaan karena berhubungan dengan nilai atau norma yang dimiliki perusahaan dalam melakukan interaksi dengan sosial dan lingkungan sekitar (Kurniawati dan Yaya, 2017). Jika perusahaan tidak beroperasi sesuai dengan harapan dari masyarakat maka masyarakat dapat bertindak untuk menghilangkan hak perusahaan untuk melanjutkan operasional bisnisnya, dengan kata lain bahwa perusahaan harus memperhatikan kelompok sosial yang berada di lingkungan perusahaan (Suchman, 1995 dalam Kurniawati dan Yaya, 2017).

### 2.3. *Islamic Social Reporting*

*Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan pengembangan dari pengukuran tanggung jawab sosial perusahaan. Pengukuran indeks ISR berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. ISR pertama kali dikenalkan oleh Haniffa (2002) dan kemudian dikembangkan oleh Othman *et al.* (2009). Haniffa (2002) menggunakan lima tema pengungkapan ISR yaitu tema investasi dan pendanaan, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema masyarakat dan tema lingkungan hidup. Kemudian Othman *et al.* (2009) menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema tata kelola perusahaan. Tujuan pengungkapan ISR adalah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat dan meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan (Haniffa, 2002). Pelaporan ISR masih bersifat sukarela karena belum ada peraturan yang resmi dari pemerintah.

### 2.4. *Good Corporate Governance (GCG)*

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan GCG sebagai seperangkat peraturan atau sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Penerapan *corporate governance* mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, diterapkannya *corporate governance* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan (Farida, 2018).

Ada berbagai macam proksi pengukuran *good corporate governance*. Dalam penelitian ini digunakan proksi ukuran dewan komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

#### 2.4.1. *Dewan Komisaris Independen*

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Salah satu syarat tersebut adalah tidak memiliki hubungan atau terafiliasi dengan direksi anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis lainnya yang dapat mempengaruhi independensinya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* (Sari dan Helmayunita, 2019). Dewan komisaris independen yang netral dan tidak terpengaruh oleh intervensi manajemen akan melindungi kepentingan para *stakeholder* dalam dorongan kepada perusahaan untuk melakukan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan dan mengungkapkannya (Nugroho dan Yulianto, 2015). Pernyataan tersebut didukung dari hasil penelitian Baidok dan Septiarini (2016) yang menyatakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris independen yang semakin besar akan meningkatkan keefektifan dalam memonitoring manajemen dan meningkatkan tekanan terhadap manajemen dalam memperluas informasi pengungkapan tanggung jawab sosial.

**H<sub>1</sub>** : Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

### 2.4.2. Komite Audit

Komite audit bertugas memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit di dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal dan kualitas pengungkapan informasi perusahaan (Kurniawati dan Yaya, 2017). Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Helmayunita (2019) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran komite audit dalam perusahaan akan semakin efektif pula pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen sehingga akan mempengaruhi luas pengungkapan ISR di dalam laporan tahunan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah *et al.*, (2017) juga menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

**H<sub>2</sub>** : Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

### 2.4.3. Kepemilikan Institusional

Murwaningsari (2009) menyatakan bahwa institusional *shareholders* dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Yulianto (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hasil tersebut menyatakan aktivitas *monitoring* yang dilakukan oleh investor institusi dapat memaksa manajemen untuk mengungkapkan informasi sosialnya.

**H<sub>3</sub>** : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

### 2.4.4. Kepemilikan Manajerial

Downes dan Goodman (1999 dalam Murwaningsari, 2009) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang terdiri dari pihak manajemen, yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan bersangkutan. Kepemilikan manajerial memperoleh keuntungan khusus atas biaya tanggung jawab sosial dari pemegang saham lainnya, struktur kepemilikan modal harus memegang peranan dalam penetapan jumlah pengeluaran tanggung jawab sosial perusahaan (Trisnawati, 2014).

**H<sub>4</sub>** : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Populasi, Sampel dan Data Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) selama periode 2017 dan 2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) berupa laporan tahunan perusahaan yang dijadikan sampel. Berikut adalah proses seleksi perusahaan yang dijadikan sampel:

**Tabel 1. Proses Seleksi Sampel Penelitian**

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan yang tergabung dalam <i>Jakarta Islamic Index</i> (JII) 30 selama periode 2017 dan 2018	30
2.	Tidak masuk 2 periode berturut-turut setiap tahun dalam <i>Jakarta Islamic Index</i> (JII) 30 tahun 2017-2018.	(9)
3.	Perusahaan JII 30 yang tidak menerbitkan laporan tahunan secara lengkap selama tahun 2017-2018	(0)
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria		21
Jumlah sampel penelitian (21 x 2)		42
Data <i>outlier</i> selama waktu pengolahan		(2)
<b>Total sampel penelitian</b>		<b>40</b>

Sumber: data diolah, 2019.

## 3.2 Variabel dan Pengukuran Variabel

### 3.2.1 *Islamic Social Reporting*

Indeks ISR dalam penelitian ini terdiri dari 43 item pengungkapan yang tersusun dalam enam tema sesuai dengan penelitian Othman *et al.*, (2009). Masing-masing pengungkapan memiliki nilai 1 apabila item pada indeks ISR terdapat dalam data perusahaan, dan nilai 0 diberikan apabila sebaliknya. Berikut rumus untuk menghitung *disclosure level* setelah pemberian nilai pada indeks ISR selesai dilakukan.

$$\text{Disclosure Level} = \frac{\text{Jumlah Skor Disclosure yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Skor Maksimum}}$$

### 3.2.2 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berada dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan. Ukuran dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan skala rasio, yaitu jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang terdapat dalam perusahaan. Pengukuran ini sesuai dengan penelitian Baidok dan Septiarini (2016)

### 3.2.3 Komite Audit

Ukuran komite audit merupakan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Skala pengukuran untuk variabel ini adalah skala nominal sesuai dengan penelitian Kurniawati dan Yaya (2017) yaitu dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. Pengukuran ini

### 3.2.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusi adalah jumlah saham yang dimiliki institusi dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional diukur dengan skala rasio yaitu jumlah saham institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Pengukuran ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Helmayunita (2019)

### 3.2.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan yang dimaksud yaitu direksi, komisaris dan jajarannya. Kepemilikan manajerial diukur dengan skala rasio yang mengacu pada penelitian Sari dan Helmayunita (2019) yaitu dengan menghitung jumlah saham manajerial dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

### 3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear berganda dan menggunakan nilai signifikansi sebesar 5% dengan model regresi sebagai berikut:

$$ISR = a + b_1 DK + b_2 KA + b_3 KI + b_4 KM + e$$

Keterangan:

- ISR : *Islamic Social Reporting*  
 a : Konstanta  
 b<sub>1</sub>-b<sub>4</sub> : Koefisien Regresi  
 DK : Dewan Komisaris Independen  
 KA : Komite Audit  
 KI : Kepemilikan Institusional  
 KM : Kepemilikan Manajerial  
 e : Error

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi berganda mensyaratkan uji asumsi klasik sebelum dilakukan pengujian persamaan regresi. Tabel 2 memberikan gambaran singkat tentang hasil uji asumsi klasik:

**Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik**

Keterangan	Hasil Uji Heteroskedastisitas	Uji Multikolinearitas	
		<i>Tolerance</i>	VIF
Dewan Komisaris Independen	0,979	0,748	1,336
Komite Audit	0,394	0,906	1,103
Kepemilikan Institusional	0,762	0,751	1,332
Kepemilikan Manajerial	0,546	0,918	1,090
<i>Kolmogrov-Smirnov</i>	0,200		
<i>Durbin-Watson</i>	2,378		

Sumber: data diolah, 2019

Hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogrov-Smirnov Test*, menunjukkan nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa keseluruhan variabel menunjukkan nilai *tolerance* > 0,1 dan *Value Inflation Factor* (VIF) < 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel penelitian. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser* menunjukkan

bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$ , sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji autokorelasi dengan *Durbin-Watson* diperoleh nilai DW 2,378, berada di daerah yang tidak dapat diinterpretasikan terjadi masalah autokorelasi ataukah tidak ( $4-d_u < DW < 4-d_l$ ) yaitu  $2,2791 < 2,378 < 2,7152$ .

Hasil penelitian dengan analisis regresi berganda menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$ISR = 0,650 + 0,125DK - 0,006KA - 0,049KI - 0,541KM + e$$

Pada tabel 3 ditunjukkan hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda:

**Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	b	Signifikansi	Keterangan
Dewan Komisaris Independen	0,125	0,007	H <sub>1</sub> Diterima
Komite Audit	-0,006	0,488	H <sub>2</sub> Ditolak
Kepemilikan Institusional	-0,049	0,231	H <sub>3</sub> Ditolak
Kepemilikan Manajerial	-0,541	0,010	H <sub>4</sub> Diterima

Sumber: data diolah, 2019.

Hasil pengujian untuk Dewan Komisaris Independen memiliki nilai signifikansi 0,007  $< 0,05$ , sehingga **H<sub>1</sub> diterima** yang artinya Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Baidok dan Septiarini (2016). Dewan Komisaris Independen memiliki fungsi pengawasan terhadap manajemen dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang, salah satunya yaitu undang-undang tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai kelompok yang tidak memiliki saham di perusahaan, dewan komisaris independen diharapkan mampu menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya salah satunya yaitu kepentingan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar yang dapat diwujudkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dikarenakan mayoritas masyarakat di Indonesia beragama islam maka diharapkan dewan komisaris independen memberikan perhatian yang lebih tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang tertera di dalam indeks ISR.

Komite Audit memiliki nilai signifikansi  $-0,488 > 0,05$ , sehingga **H<sub>2</sub> ditolak** yang artinya Komite Audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hasil ini mendukung penelitian dari Kurniawati dan Yaya (2017), tetapi belum mendukung penelitian Hasanah *et al.* (2017). Tidak berpengaruhnya komite audit terhadap pengungkapan ISR kemungkinan karena komite audit lebih melakukan tanggung jawab dalam bidang tata kelola perusahaan serta tanggung jawab di bidang laporan keuangan daripada tanggung jawab dalam pengungkapan informasi sosial, sehingga jumlah komite audit tidak menjamin bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan kecurangan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial akan berjalan secara efektif (Kurniawati dan Yaya, 2017).

Kepemilikan Institusional memiliki nilai signifikansi  $-0,231 > 0,05$ , sehingga **H<sub>3</sub> ditolak** yang artinya Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Nugraheni dan Yuliani (2017) tetapi belum mendukung penelitian Nugroho dan Yulianto (2015). Tingkat kepemilikan saham institusi masih belum efektif dalam *me-monitoring* pengungkapan ISR. Hal ini terjadi karena kepemilikan institusi di perusahaan belum begitu mempertimbangkan pengungkapan ISR sebagai kriteria dalam melakukan investasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja keuanganlah yang menjadi indikator utama dalam melakukan investasi.

Kepemilikan Manajerial memiliki nilai signifikansi  $-0,010 < 0,05$ , sehingga **H<sub>4</sub> diterima** yang artinya Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin rendah tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hal tersebut karena rata-rata perusahaan yang menggunakan indeks saham syariah memiliki tingkat kepemilikan manajerial yang rendah sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat pengungkapan ISR yang baik. Hasil ini belum mampu mendukung temuan Trisnawati (2014) serta Sari dan Helmayunita (2019).

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bursa syariah di Indonesia masih berorientasi pada pengungkapan informasi keuangan dibandingkan tanggung jawab sosial. Hal ini tidak lepas dari fokus informasi investor yang cenderung menggunakan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Penelitian yang mendasarkan pada pengungkapan ISR masih sangat terbatas di Indonesia sehingga membuka peluang penelitian ini dengan menggunakan indeks JII terbaru yaitu JII70. Penelitian ini menggunakan periode penelitian jangka pendek, sehingga masih memungkinkan untuk menggunakan periode penelitian dalam jangka panjang dan menambahkan proksi lain untuk mengukur *Good Corporate Governance*, dengan menggunakan laporan keberlanjutan perusahaan sebagai sumber data.

## 6. REFERENSI

- [1]Novrizal, M.F dan Meutia F. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2012-2015 dengan Menggunakan Islamic Social Reporting (ISR) Index sebagai Tolok Ukur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. 1 (2): 177-189
- [2]Fitria, S dan Dewi H. 2010. Islam dan Tanggung Jawab Sosial : Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Index dan Islamic Social Reporting Index. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XIII 2010*. Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman.

- [3]Haniffa, R. 2002. Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective. *International Management and Accounting*. 1(2): 128-146
- [4]Othman, R., A.M. Thani dan E.K., Ghani. 2009. Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia. *Journal of International Studies*. 12(1): 4-20.
- [5]Murwaningsari, E. 2009. Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities, dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 11(1): 30-41
- [6]Hartini, T. 2018. Analisis Pengaruh Firm Size dan Profitabilitas Terhadap Islamic Social Reporting (ISR) Dengan Earning Growth sebagai Variabel Moderating pada Jakarta Islamic Index (JII). *NURANI*. 18(1): 137-150
- [7]Hasanah, N.T, W.W. Novi dan Sudarno. 2017. Analisis Pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. 5(2): 115-120
- [8]Maulida, A.P., A. Yulianto dan Asrori. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Lombok: Universitas Mataram.
- [9]Mais, R.G dan L. Nuning. 2018. Pengaruh Sharia Governance Structure Terhadap Pengungkapan CSR Berdasarkan Islamic Social Reporting Index. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. 18(1): 83-100
- [10]Khasanah, Z dan A. Yulianto. 2015. Islamic Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah. *Accounting Analysis Journal*. 4(4).
- [11]Kurniawati, M dan R. Yaya. 2017. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. 18(2): 163-171.
- [12]Farida, A. 2018. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*. 10(1): 31-42.
- [13]Sari, M.S dan N. Helmayunita. 2019. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting Index (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2013-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 1(2): 751-768.
- [14]Nugroho, M.N dan A. Yulianto. 2015. Pengaruh Profitabilitas dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan CSR Perusahaan Terdaftar di JII 2011-2013. *Accounting Analysis Journal*. 4(1): 1-12.
- [15]Baidok, W dan D.F. Septiarini. 2016. Pengaruh Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Syariah, Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 3(12): 1020-1034.
- [16]Trisnawati, R. 2014. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Industri Perbankan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Program Studi Akuntansi*: 367-386.
- [17]Nugraheni, P dan R.D. Yuliani. 2017. Mekanisme Corporate Governance dan pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. 10(1): 130-155.